

---

**PENGARUH JARINGAN KEKERABATAN TERHADAP PRAKTIK POLITIK  
MASYARAKAT DESA NEPO (STUDI ANTROPOLOGI POLITIK)**

**M. Saipul Iman<sup>1</sup>, Nurlela<sup>2</sup>**

Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Makassar

Email: mhmdsaipuliman@gmail.com

---

**KATA KUNCI**

Kepemimpinan, Kekerabatan, Politik

---

**ABSTRACT**

*The problem of kinship networks cannot be separated from an element that is very, very important in maintaining a power owned. The purpose of the research is to find out the role of kinship networks in local leadership in Nepo Village. This research uses qualitative research methods with a descriptive approach to analysis. The focus of the research is on the role of kinship networks in local practices in Nepo village, Mallusetasi District, Barru Regency. The source of data obtained by the study relied on primary and secondary through interviews and observations. The validity of data in research is often done with validity tests. Based on the results of the research, the role of kinship in Nepo Village in the contestation of the Village Head Election as a basis for understanding local politics using the lens of political anthropology. Where in the implementation of democratic values, all people should dare to make their own political decisions without any intervention from kinship networks.*

**ABSTRAK**

Permasalahan Jaringan Kekerabatan tidak terlepas dari sebuah unsur yang sangat-sangat penting dalam menjaga suatu kekuasaan yang dimiliki. Masalah Jaringan Kekerabatan tersebut seperti Solidaritas Sosial Masyarakat. Tujuan dari penelitian yaitu hendak mengetahui peran jaringan Kekerabatan dalam kepemimpinan local di Desa Nepo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Fokus penelitian ada pada peran jaringan kekerabatan dalam praktik lokal yang ada di desa Nepo Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru. Sumber data yang diperoleh penelitian bersandar pada primer dan sekunder melalui wawancara dan

observasi. Keabsahan data pada penelitian sering kali dilakukan dengan uji validitas. Berdasarkan Hasil penelitian yaitu peran kekerabatan yang ada di Desa Nepo dalam kontestasi Pemilihan Kepala Desa sebagai dasar dalam memahami politik lokal dengan menggunakan kacamata antropologi politik. Di mana dalam pelaksanaan nilai demokrasi seharusnya seluruh masyarakat berani mengambil keputusan politik tersendiri tanpa ada intervensi daripada jaringan kekerabatan.

---

## **PENDAHULUAN**

Desa adalah desa dan desa adat atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Indonesia, 2014) (Barniat, 2018). Desa merupakan bagian dari Pemerintahan paling dasar dalam sistem Pemerintahan Republik Indonesia, sehingga Desa merupakan aset yang sangat berharga bagi Pemerintah Indonesia yang kemudian perlu ada peningkatan kualitas (Karim, 2019).

Masyarakat Desa memiliki kesamaan dan kesatuan atas perasaan sehingga masyarakat Desa memiliki kekerabatan yang lebih unggul dibandingkan dengan masyarakat perkotaan (Ibrahim, 2019). Masyarakat Desa dalam kajian sosial masih mempertahankan rasa solidaritas yang tinggi sehingga rasa kemanusiaan senantiasa kita rasakan jika kemudian menjalani kehidupan di Pedesaan. Solidaritas adalah suatu ikatan primordial masyarakat yang mempersatukan berbagai latar belakang orang untuk dapat hidup bersama. Solidaritas dapat diartikan sebagai perasaan atau ungkapan dalam sebuah kelompok yang dibentuk oleh kepentingan bersama (Nasution, 2009). Salah satu contoh solidaritas yang masih sering dilihat di Pedesaan yaitu Gotong Royong yang mengacu pada kegiatan saling menolong dalam ruang lingkup masyarakat.

Selain rasa solidaritas tinggi masyarakat Desa juga memiliki prinsip kekeluargaan yang tinggi pula (Setyorini, 2020). Hal ini sangat berbeda dengan kehidupan masyarakat perkotaan yang memiliki karakteristik individualisme, kehidupan pedesaan memiliki rasa kekeluargaan yang tinggi (Nizar, 2013). Dalam kehidupan masyarakat Desa tentu mengalami konflik horizontal, namun dalam penyelesaian konflik yang terjadi kerap diadakan pengadilan sosial yang dimotori oleh Kepala Desa, Pemangku Adat, Tokoh Masyarakat, serta Tokoh Agama dalam memimpin penyelesaian masalah yang terjadi.

Namun, dalam beberapa fenomena yang kerap terjadi di kehidupan masyarakat Desa, terdapat kelompok keluarga atau klen dalam suatu Desa. Dalam suatu kasus misalnya terdapat suatu kelompok keluarga atau klen keluarga yang hidup berdampingan. Keluarga tersebut hidup bersama, saling membutuhkan dan saling berinteraksi satu sama lain. Sebagaimana yang disebutkan bahwa interaksi sosial ini berlangsung secara intens yang akan melahirkan perasaan sentimen komunitas yang memiliki unsur-unsur seperti seperasaan, sepenanggungan dan saling memerlukan. Proses interaksi yang dilakukan secara terus menerus melahirkan setiap anggota keluarga saling mengenal satu sama lain secara mendetail.

## *Pengaruh Jaringan Keekerabatan Terhadap Praktik Politik Masyarakat Desa Nepo (Studi Antropologi Politik)*

Kekerabatan yang ada dalam tubuh masyarakat Desa melahirkan hirarki kekuasaan yang mendominasi dalam suatu Desa (Syukur, 2016). Berdasarkan literatur yang ditulis Budiardjo bahwa kekuasaan dilihat dari kemampuan individu atau kelompok untuk bagaimana kemudian mempengaruhi individu atau kelompok untuk mendominasi atau mengarahkan berdasarkan kehendak dari yang memiliki kekuasaan (Budiardjo, 1995). Sehingga dalam konteks Keekerabatan dan Kekuasaan memiliki keterikatan dalam politik lokal seperti di Desa. Masyarakat Desa pada umum masih menjunjung nilai-nilai norma dan tradisi yang kemudian sulit dipisahkan, karena itu sudah mendarah daging dalam tubuh masyarakat Desa (Lestari, 2019). Termasuk halnya dengan keekerabatan yang masih dijaga sampai sekarang dikarenakan tingginya nilai solidaritas masyarakat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Faktor keekerabatan merupakan sebuah unsur yang sangat-sangat penting dalam menjaga suatu kekuasaan yang dimiliki (Sihotang, 2019). Seperti yang dikatakan oleh Suwargono dan Nugroho bahwa Antropologi Politik memperlihatkan ikatan-ikatan yang kompleks antara kekuasaan dan keekerabata (Nugroho., 2000).

Fenomena keekerabatan dan kekuasaan yang hari ini dapat dilihat dari Desa Nepo sebagai salah satu objek penelitian. Desa Nepo berada di Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Barru, Kecamatan Mallusetasi. Kehidupan sehari-hari masyarakat Desa Nepo adalah bertani dan berkebun. Masyarakat Desa Nepo cenderung bersifat homogen dan solidaritas masyarakat masih memiliki nilai yang sangat kuat. Keekerabatan yang ada dalam tubuh masyarakat Desa Nepo tidak dapat dilepaskan dari konsep ikatan kekeluargaan Kerajaan atau biasa disebut sebagai Arung. Masyarakat Desa Nepo menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari, misalnya ketika terdapat keluarga musibah tentu saja kita akan melihat rumpun keluarga dan tetangga saling bahu membahu membantu keluarga yang terkena musibah, bantuan yang dilakukan biasa seperti materi maupun nonmateri (Saad, 2020).

Kuatnya pola keekerabatan dalam kepemimpinan Kepala Desa Nepo terutama dalam praktik politik, bahwa seluruh perangkat pemerintah Desa mulai dari Ketua RT/RW sampai pada Kepala Dusun memiliki keakraban keekerabatan dengan Kepala Desa Nepo. Terutama dalam pemilihan Kepala Desa Nepo tercermin pola keekerabatan keluarga dalam mendapatkan suatu kekuasaan, bahwa dalam kasus yang diteliti bahwa Kepala Desa Nepo terpilih menjadi kepala Desa dikarenakan keluarga Kepala Desa ini masih mengalir darah kerajaan atau Arung sehingga masyarakat Desa Nepo merasa canggung atau segan. Hal itu menjadi poin utama kenapa kemudian Kepala Desa ini terpilih menjadi Kepala Desa Nepo.

Hal itulah menjadi alasan penulis ingin meneliti fenomena yang terjadi pada Desa tersebut. Penelitian hendak ingin melihat peran keekerabatan yang ada di Desa Nepo dalam kontestasi Pemilihan Kepala Desa sebagai dasar dalam memahami politik lokal dengan menggunakan kacamata antropologi politik (Saden, yang Ideal, Jagau, Dayak, & Raya, n.d.). Di mana dalam pelaksanaan nilai demokrasi seharusnya seluruh masyarakat berani mengambil keputusan politik tersendiri tanpa ada intervensi daripada jaringan keekerabatan. Alasan lain penelitian ini menarik untuk dilakukan adalah karena belum ada penelitian sejenis yang meneliti di Desa Nepo yang masyarakatnya memiliki rasa kekeluargaan yang tinggi.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskripsi analisis. Sesuai dengan tujuan penelitian yaitu peneliti hendak mengetahui peran jaringan

## *Pengaruh Jaringan Kekeabatan Terhadap Praktik Politik Masyarakat Desa Nepo (Studi Antropologi Politik)*

kekeabatan dalam kepemimpinan lokal di Desa Nepo dimana hasil penelitian nantinya akan diuraikan dengan menggunakan kalimat deskripsi. Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitiannya. Lokasi penelitian ini adalah pada masyarakat masyarakat Desa Nepo yang terletak di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Baru (Ramlah, 2021). Fokus penelitian ada pada peran jaringan kekeabatan dalam praktik politik lokal yang ada di Desa Nepo Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru.

Sedangkan sumber data yang diperoleh oleh peneliti bersandar pada primer dan sekunder melalui wawancara dan observasi. Dalam keabsahan data pada penilitian sering kali dilakukan dengan uji validitas. Uji validitas dalam penelitian kualitatif ini sangat dibutuhkan karena dapat digunakan sebagai bukti bahwa data tersebut asli bukan hasil rekayasa. Pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber-sumber data yang berbeda dengan memeriksa bukti-bukti yang berasal dari sumber-sumber tersebut serta menggunakannya untuk membangun justifikasi tema-tema secara koheren.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Gambaran Umum Sistem Kepemimpinan Masyarakat Desa Nepo**

Membicarakan persoalan kepemimpinan tentu merujuk pada dua sistem kepemimpinan secara umum yaitu informal dan formal. Kepemimpinan formal adalah kepemimpinan yang terbentuk dimana seseorang menerima status sebagai pemimpin melalui mekanisme pemilihan yang resmi (Damayanti, 2020). Sedangkan kepemimpinan informal adalah kepemimpinan yang pembentukannya tidak didasarkan pada pemilihan secara resmi dimana kedudukan diperoleh karena adanya pengakuan dari masyarakat (SOFYAN, 2021). Keberadaan kepemimpinan formal maupun informal sangat penting bagi kehidupan masyarakat Di Desa Nepo juga terdapat kepemimpinan formal maupun informal.

#### **a. Informal**

Kehidupan desa tidak lepas dari unsur kepemimpinan orang-orang yang berpengaruh dan menjadi panutan bagi semua orang. Di Nepo dikenal adanya para pemimpin atau tokoh yang memang dipercaya oleh masyarakat menguasai keahlian tertentu. Para pemimpin ini tidak dipilih secara formal oleh masyarakat, namun karena ia memiliki kelebihan atau kemampuan yang tidak banyak dimiliki oleh orang lain (Rijal, 2019). Kehidupan Desa Banyulegi dipengaruhi oleh adanya kebudayaan agama Islam sehingga tokoh ulama atau kyai memiliki peran penting dalam kehidupan.

Secara umum, pemimpin informal menjadi tokoh panutan dan berperan untuk mengatur dan mempertahankan nilai-nilai yang dipegang teguh oleh masyarakat (Mayrudin, Husna, & Yuliati, 2020). Desa Nepo juga memiliki organisasi kepemudaan yaitu Karang Taruna Desa Nepo yang diketuai oleh Ilham yang berasal dari Dusun Lanrae. Tak hanya kaum laki-laki, perempuan di Desa Nepo pun aktif dalam kegiatan-kegiatan positif yang tergabung dalam organisasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang diketuai oleh istri kepala desa yaitu Organisasi ini berperan dalam memberdayakan perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan di Desa Nepo.

Selain beberapa organisasi di atas, masyarakat juga membentuk sebuah organisasi informal guna menunjang kehidupan pertanian di Desa Nepo. Kelompok tersebut merupakan wadah bagi para petani untuk saling bertukar pikiran dan bekerja sama guna mengembangkan pertanian yang ada di Desa Nepo. Tak jarang pula, kelompok tani menerima bantuan dari pemerintah berupa bibit tanaman, pupuk, maupun alat pertanian lainnya.

**b. Formal**

Salah satu kepemimpinan formal yang terdapat di desa yaitu kepemimpinan kepala desa beserta jajarannya yang tergabung dalam pemerintahan desa. Desa Nepo dipimpin oleh seorang kepala desa yaitu orang yang dipilih secara formal oleh masyarakat guna menjalankan tugas dan fungsinya sebagai kepala dari organisasi pemerintahan pada tingkat desa. Kepala desa dibantu oleh sekretaris, Kepala urusan keuangan, kepala urusan umum, kepala urusan pemerintahan, kepala urusan kesejahteraan, serta beberapa Kepala Dusun. Perangkat desa saling bekerjasama guna melayani masyarakat dan mengelola pembangunan di Desa Nepo.

Jabatan pemerintahan desa dijabat oleh masyarakat Desa Nepo. Orang-orang yang menempati kursi pemerintahan desa dapat diibaratkan sebagai wakil masyarakat yang bertanggung jawab mengelola pembangunan di Desa Nepo. Para pejabat desa merupakan sosok yang diharapkan masyarakat dapat melaksanakan pembangunan dengan baik. Pelaksanaan pembangunan juga membutuhkan partisipasi dan kerjasama masyarakat untuk saling bahu-membahu demi mencapai tujuan bersama. Perangkat Desa Nepo memperoleh jabatannya melalui dua mekanisme, pertama yaitu dengan cara diminta langsung oleh kepala desa untuk menduduki jabatan tertentu. Kedua, dengan mengikuti seleksi dan tes yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Barru (Imbaruddin, 2019).

Sumber pendapatan kepala desa dan perangkat desa di Nepo diperoleh dari sumber yaitu penghasilan berupa gaji yang diberikan oleh negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017. Besaran tunjangan dari negara yang diterima bergantung dari tingkat jabatan dan masa jabatan perangkat. Sementara untuk Desa Nepo besarnya tunjangan perangkat desa disesuaikan dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Barru.

Guna mengawasi dan mengontrol kinerja kepala desa dan perangkat desa dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Tugas dan fungsi BPD adalah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama kepala desa, menyalurkan aspirasi masyarakat, serta mengawasi kinerja kepala desa (Langoy, 2016). RW dan RT memiliki peran yang cukup penting dalam membantu pemerintah desa untuk melaksanakan pembangunan desa. RW dan RT dapat menjadi penyambung lidah antara warga dengan aparat pemerintahan sehingga aspirasi warga dapat tersampaikan. Salah satu kegiatan yang biasanya menjadi tugas dari RT maupun RW yaitu mengajak masyarakat Desa Banyulegi untuk melakukan kegiatan gotong royong.

**Struktur Jaringan Keekerabatan dalam Kepemimpinan Lokal di Desa Nepo**

Relasi antara keekerabatan dan kekuasaan mewarnai kehidupan politik di Indonesia. Fenomena politik keekerabatan telah ada sejak masa pra kolonial dimana politik pengaturan desa sejak era kolonial dan dilanjutkan oleh Orde Baru mewariskan kepemimpinan desa yang feodal dan dinastik serta didominasi jejaring keluarga elit (Prawoto, 2018). Hal ini menunjukkan bahwa politik keekerabatan bukanlah sesuatu yang baru namun penting untuk dikaji.

Fenomena relasi antara kekuasaan dan keekerabatan terjadi pada dunia kepemimpinan di Desa Nepo dimana kepala desa dan perangkat desa sebagian masih memiliki ikatan keekerabatan (Saad, 2020). Sejumlah orang perangkat desa, ada beberapa orang diantaranya masih memiliki ikatan keekerabatan termasuk Kepala Desa Nepo. Keluarga menjadi prioritas utama untuk ditempatkan dalam kursi jabatan pemerintahan desa.

## *Pengaruh Jaringan Keekerabatan Terhadap Praktik Politik Masyarakat Desa Nepo (Studi Antropologi Politik)*

Meskipun rasa kekeluargaan terjalin kuat dalam lingkungan kerja, para perangkat desa sangat menaruh hormat kepada Pak Desa. Misalnya dalam hal pengambilan keputusan, bawahan tidak akan berani menentang atau mengajukan ketidaksepakatan dengan keputusan kepala desa. Hal ini dikarenakan di mata bawahan, sosok Pak Desa memiliki kewenangan tertinggi dan setiap keputusan yang dibuat harus dihormati. Mengambil keputusan tanpa persetujuan Pak Desa merupakan tindakan yang dianggap kurang sopan dan tidak menghormati pemimpin

Kepemimpinan di Desa Nepo diwarnai dengan unsur keekerabatan di dalamnya. Berdasarkan hal tersebut yang dianalisis dengan pendekatan genetik menunjukkan bahwa kehidupan politik masyarakat Desa Nepo terbentuk atas jaringan keekerabatan. Hal ini Sebagaimana dijelaskan oleh Maine bahwa asal usul terbentuknya masyarakat politik berasal dari relasi keekerabatan kemudian sampai pada tingkat yang lebih besar membentuk negara. Kepala Desa Nepo yaitu Pak Toaha berasal dari keluarga yang cukup terhormat di desa, hal ini ditunjukkan dengan sejarah para pendahulunya yang pernah menduduki jabatan-jabatan strategis dalam pemerintahan desa. Sehingga dapat dikatakan bahwa kemampuan kepala desa dalam memimpin diturunkan dari para pendahulunya.

Tipe kepemimpinan Pak Toaha termasuk dalam gaya kepemimpinan paternalistik otoriter di mana sikap atau sifat seorang pemimpin menunjukkan sosok yang sangat memiliki wibawa, kekuasaan, dan tanggung jawab terhadap bawahannya. Pak Toaha berusaha untuk menjadi contoh yang baik terhadap bawahannya. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan oleh Mulder (2001) bahwa kepemimpinan paternalistik otoriter menganggap bawahannya seperti manusia yang belum dewasa sehingga membutuhkan bimbingan dan perlindungan. Tipe kepemimpinan ini mengambil dari nilai-nilai keluarga Jawa di mana seseorang harus menaruh rasa hormat dan patuh terhadap orang yang lebih tua. Gaya kepemimpinan semacam ini juga serupa dengan kepemimpinan pada masa Orde Baru era Soeharto. Sebagaimana dijelaskan oleh Shiraishi (2001) bahwa memimpin sebuah negara diibaratkan seperti memimpin sebuah keluarga di mana bapak adalah seorang atasan atau pemimpin yang harus dihormati, sementara anak adalah bawahan yang harus patuh dan mampu menjaga perilaku (Soesanto, 2019).

### **Peran Jaringan Keekerabatan dalam Praktik Politik Lokal di Desa Nepo**

Pepatah bahwa *blood is thicker than the water* semakin menampakkan wujud yang nyata dalam dunia kekuasaan di Indonesia (Hady, 2018). Tak hanya di kota-kota besar, fenomena politik keekerabatan juga banyak terjadi di desa. Politik keekerabatan memang menjadi salah satu isu yang menarik dan penting dalam antropologi politik. Dalam hal ini, politik keekerabatan tidak hanya dipahami dalam perspektif politik, tetapi juga menjadi masalah antropologis

Berdasarkan temuan peneliti di lapangan, ditemukan beberapa peran jaringan keekerabatan dalam kepemimpinan di Desa Nepo antara lain:

#### **1. Jaringan keekerabatan sebagai modal pemenangan pemilihan kepala desa di Nepo**

Tujuan memperoleh dan mempertahankan kekuasaan membuat seseorang berupaya memanfaatkan segala bentuk sumber daya yang dimilikinya (Royandi, Satria, & Saharuddin, 2019). Dalam pemilihan Kepala Desa Kemarin menunjukkan masing-masing jaringan keekerabatan yang dimiliki oleh beberapa kandidat. Jaringan keekerabatan yang dimiliki oleh masing-masing kandidat digunakan untuk memperoleh suara pada pemilihan kepala desa. Dalam proses pemilihan yang dilakukan kemarin dapat membuat kesimpulan

## *Pengaruh Jaringan Keekerabatan Terhadap Praktik Politik Masyarakat Desa Nepo (Studi Antropologi Politik)*

bahwa Masyarakat yang masih memiliki ikatan kekerabatan dengan Pak Toaha akan merasa pakewuh atau tidak enak hati apabila tidak memilihnya.

Adanya relasi kekerabatan antara kandidat dengan masyarakat membuat masyarakat merasa pakewuh atau merasa tidak enak hati apabila masyarakat tidak memilih kandidat tersebut. Keekerabatan sangat mempengaruhi perilaku pemilih sehingga memungkinkan seseorang yang telah menentukan pilihan mampu mengubahnya dengan alasan kedekatan secara primordial. Sementara bagi masyarakat yang tidak memiliki ikatan kerabat dengan kandidat akan bebas memilih sesuai hati nuraninya tanpa merasa pakewuh.

Kepala Desa Nepo juga memanfaatkan modal ekonomi yang dimiliki guna memperoleh suara yang tinggi dari masyarakat. Pak Toaha menggunakan modal ekonominya dengan cara memberikan sejumlah uang kepada masyarakat dengan syarat akan memilih dan mendukungnya dalam pemilihan kepala desa. Nominal yang diberikan bergantung pada kriteria warga di mana apabila karakter warga cenderung sulit dibujuk untuk memilih kandidat maka nominal yang diberikan akan lebih besar dibanding yang lain.

### **2. Jaringan kekerabatan sebagai penentuan rekan kerja**

Keekerabatan tidak hanya berperan pada pemenangan Pak Toaha menjadi seorang kepala desa, namun juga sampai pada titik penentuan rekan kerja. Tidak dapat dipungkiri bahwa pemilihan rekan kerja dalam pemerintahan Desa Nepo banyak ditentukan oleh unsur kekerabatan. Kepala Desa Nepo menempatkan beberapa kerabatnya pada jabatan pemerintahan desa. Pada saat sistem perekrutan perangkat desa masih bisa dipilih langsung oleh kepala desa, namun sekarang tidak bisa lagi. Berdasarkan Peraturan Bupati.

### **3. Memperlancar roda birokrasi**

Adanya unsur kekerabatan dalam pemerintahan Desa Nepo mempermudah akses individu dalam memperoleh kedudukan. Berdasarkan penelitian di lapangan diperoleh informasi bahwa Pak Toaha baru menjabat 1 periode. Keberhasilannya memenangkan pemilihan kepala desa tentu saja tidak lepas dari peran dan dukungan keluarga. Sebelum Pak Toaha menjabat kepala Desa, dari hasil penelitian yang dilakukan bahwa yang mendominasi keputusan politis yang ada pada pemerintahan Desa Nepo merupakan sekertaris Desa, hal itu dikarenakan Kepala Desa sebelumnya tidak memiliki kekuatan politik yang lebih untuk memutuskan segala sesuatu yang ada di Desa. Hal tersebutlah yang membuat Pak Toaha mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa yang kemudian tak lepas daripada dukungan kerabat dan keluarga itu sendiri.

## **Dampak Keberadaan Jaringan Keekerabatan dalam Praktik Politik Lokal Terhadap Kehidupan Masyarakat di Desa Nepo**

Pada dasarnya, jaringan-jaringan kekerabatan sangat menguntungkan bagi seseorang untuk mencapai tujuan yaitu memperoleh kekuasaan (UMAM, 2020). Namun, jaringan kekerabatan yang terdapat dalam dunia kepemimpinan seperti pada pemerintahan Desa Nepo tentu saja akan memberikan dampak bagi kehidupan masyarakat. Adapun dampak keberadaan jaringan kekerabatan dalam kepemimpinan dan pemerintahan desa bagi masyarakat Nepo.

Masyarakat Desa Nepo hidup dalam keselarasan dan kerukunan. Hal tersebut disebabkan oleh tingginya solidaritas masyarakat baik dalam ikatan kekerabatan maupun kehidupan bertetangga. Solidaritas yang terbentuk dalam masyarakat akan mengurangi terjadinya potensi konflik sehingga kehidupan di Desa Nepo nampaknya mencerminkan kehidupan yang damai dan rukun. Solidaritas tercermin dalam kekerabatan di Desa Nepo.

*Pengaruh Jaringan Kekeabatan Terhadap Praktik Politik Masyarakat Desa Nepo (Studi Antropologi Politik)*

Adanya ikatan kekeabatan dalam pemerintahan desa memperkuat hubungan solidaritas antar anggota sehingga dapat meminimalisasi terjadinya konflik. Kerabat akan memilih untuk menjaga hubungan kekeluargaan sehingga sebisa mungkin dapat menghindari perbedaan pendapat atau hal-hal yang memungkinkan dapat memunculkan konflik. Selain memperkuat solidaritas, ikatan kekeabatan juga memunculkan perasaan ewuh pakewuh dalam diri individu. Sisi positif adanya rasa ewuh pakewuh yaitu dapat mengurangi kemungkinan terjadinya permasalahan dalam lingkungan pemerintahan desa (Nugroho, 2018). Bawahan lebih memilih untuk menjaga sikap dan perilaku yang dianggap tidak sopan dan tidak hormat kepada atasan.

Kecemburuan masyarakat juga timbul akibat adanya tindakan memprioritaskan kerabat atau keluarga untuk duduk dalam jabatan-jabatan perangkat desa. Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa struktur pemerintahan di Desa Nepo sebagian dikuasai oleh satu klan keluarga yang menempati jabatan cukup krusial. Hal ini tentu menimbulkan kecemburuan dalam masyarakat yang menginginkan keadilan dalam sistem penentuan anggota perangkat desa. Sikap kepala desa yang menempatkan dan memilih kerabatnya dalam jabatan pemerintahan desa justru akan membatasi peluang masyarakat lain yang lebih berkompeten untuk dapat berkontribusi dalam pemerintahan desa guna mewujudkan pembangunan (Kiranantika, 2020).

Tak hanya itu, kecemburuan juga muncul ketika bantuan-bantuan pemerintah justru banyak diberikan kepada kerabat atau orang terdekat Kepala Desa Nepo. Pemerintah desa seringkali mengabaikan kriteria orang yang berhak menerima bantuan sehingga yang diutamakan justru adalah orang-orang yang masih memiliki kedekatan atau hubungan kekeabatan dengan aparat desa.

Pemerintahan desa yang kurang terbuka terhadap warga membuat sulitnya menyalurkan aspirasi masyarakat. Terlebih lagi, lingkungan pemerintahan desa yang didominasi oleh keluarga Pak Toaha justru akan menghambat keterbukaan karena pada dasarnya kerabat akan menjaga nama baik keluarga meskipun terjadi tindakan penyelewengan. Anggota keluarga akan saling berusaha untuk menjaga satu sama lain sehingga praktik penyalahgunaan kekuasaan sangat sulit terbongkar pada sekelompok orang yang tertutup.

Bada Permusyawaratan Desa juga tidak menjalankan tugas dan fungsinya dengan optimal dan profesional. Tidak hanya itu, pengawasan pemerintah tingkat kabupaten juga telah dilakukan namun tidak efektif untuk mencegah terjadinya penyelewengan dana pembangunan desa. Pengelolaan pembangunan tak selamanya melibatkan partisipasi masyarakat. Lamanya masa kepemimpinan Pak Wibowo memunculkan berbagai penilaian dari masyarakat salah satunya adalah kurangnya transparansi terhadap penggunaan dana desa. Dalam setiap pembangunan proyek-proyek fisik seperti pembangunan jalan, pemerintah desa tidak pernah melaporkan penggunaan anggaran untuk kegiatan tersebut secara lisan kepada masyarakat.

Politik kekeabatan memperkuat proses kekuasaan yang berjalan meskipun berada pada koridor yang salah. Hal ini berkaitan dengan transparansi aparat pemerintahan desa terhadap kegiatan pembangunan yang berjalan. Anggaran dana desa tidak selamanya dimanfaatkan secara optimal guna mewujudkan pembangunan.

Pada dasarnya, proses seseorang dalam menjalankan kepemimpinannya tentu saja akan mendapatkan opini baik ataupun buruk dari masyarakat. Proses kepemimpinan Pak Toaha yang tak lepas dari peran keberadaan jaringan kekeabatan juga memberikan dampak bagi kehidupan masyarakat. Keberadaan jaringan kekeabatan dalam pemerintahan desa dapat

## *Pengaruh Jaringan Keekerabatan Terhadap Praktik Politik Masyarakat Desa Nepo (Studi Antropologi Politik)*

menciptakan birokrasi yang kuat dan jarang terjadi konflik. Hal tersebut didasari oleh perasaan ewuh pakewuh seorang bawahan terhadap atasannya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Soeharjono (2013) bahwa budaya birokrasi ewuh pakewuh yaitu pola sikap santun di lingkungan birokrasi yang dilakukan pegawai atau pejabat selaku bawahan yang segan atau sungkan menyatakan pendapat yang mungkin bertentangan. Dalam kasus di Desa Nepo tersebut menunjukkan bahwa ewuh pakewuh diterapkan demi menghindari konflik dan menjaga hubungan baik dengan kerabatnya. Seorang bawahan yang ewuh pakewuh akan merasa tidak enak hati ketika harus menentang kebijakan yang diambil oleh pemimpin.

Namun, sifat relasi keekerabatan yang cenderung tertutup justru akan melanggengkan praktik-praktik penyalahgunaan kekuasaan dalam pemerintahan desa. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Endraswara (2013) bahwa ewuh pakewuh saat ini menjadi budaya saling tutup-menutupi borok, tak mau mengadili atasan atau teman yang seadil-adilnya meskipun berada pada koridor yang salah. Dampak semacam ini tentu saja akan merugikan masyarakat. Aparat desa yang diharapkan mampu menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik, justru memanfaatkan kekuasaannya untuk memperoleh keuntungan pribadi.

Kehidupan di Desa Banyulegi yang tampak nyaman dan damai dengan solidaritas masyarakatnya yang tinggi ternyata menyembunyikan ketidakselarasan di dalamnya. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Geertz (dalam Endraswara, 2013) bahwa dalam masyarakat Jawa dikenal dengan istilah rukun yaitu mengelola hubungan sosial agar terlihat harmonis tanpa memperdulikan perasaan hati. Dalam hal ini disebut oleh Geertz sebagai “Harmonious Social Appearance” yang merupakan kemampuan untuk menyimpan perasaan tidak senang, ketidaksetujuan, maupun amarah guna menjaga hubungan sosial agar tetap terlihat baik-baik saja (Geertz dalam Endraswara, 2013). Hal tersebut tergambar dalam kehidupan di Desa Banyulegi yang tampak damai dan tidak ada konflik, padahal di dalamnya terdapat ketidakselarasan yang dirasakan oleh masyarakat.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil Penelitian dan Pembahasan yang telah dilakukan adalah Pengaruh Jaringan Keekerabatan Terhadap Praktik Politik Masyarakat Desa Nepo adalah kekuasaan.dampak keberadaan jaringan keekerabatan dalam Kepemimpinan dan pemerintahan desa bagi Masyarakat Nepo dan relasi antara keekerabatan dan kekuasaan kehidupan politik di Indonesia. Fenomena politik keekerabatan telah ada sejak masa pra colonial.memiliki dampaka keberadaan jaringan keekerabatan dalam kepemimpinan dan pemerintah desa bagi masyarakat nepo.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Barniat, Zulman. (2018). Otonomi Desa: Konsep Teoritis dan Legal. *Jurnal Analisis Sosial Politik*, 2(2), 25–40. [Google Scholar](#)
- Damayanti, Evi. (2020). *Konsep Islam dalam Tradisi Mappatebe'pada Masyarakat Bugis Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru*. IAIN Parepare. [Google Scholar](#)
- Hady, Nuruddin. (2018). Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 33/Puu-Xiii/2015 Dalam Upaya Memutus Dinasti Politik Dan Antisipasi Pada Pilkada Mendatang. *Arena Hukum*, 11(3), 484–499. [Google Scholar](#)
- Ibrahim, Jabal Tarik. (2019). *Sosiologi Pedesaan*. UMMPress. [Google Scholar](#)
- Imbaruddin, Amir. (2019). *Birokrasi, Akuntabilitas, Kinerja*. Deepublish. [Google Scholar](#)
- Karim, Abdul. (2019). Peningkatan Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa

- Pengaruh Jaringan Kekebabatan Terhadap Praktik Politik Masyarakat Desa Nepo (Studi Antropologi Politik)*  
(BUMDes). Nas Media Pustaka, Makassar. [Google Scholar](#)
- Kiranantika, Anggaunita. (2020). *Perempuan, anak dan keluarga dalam arus perubahan*. Nas Media Pustaka. [Google Scholar](#)
- Langoy, Fitrianiingsih. (2016). Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Dalam Pembangunan (Suatu Studi Di Desa Tumani Selatan Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan). *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, 3(1), 160583. [Google Scholar](#)
- Lestari, Anggi Dwi Nira. (2019). *Upaya Penanaman Nilai-Nilai Religius Dalam Tradisi Baritan (Studi Kasus Di Desa Gawang Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan)*. IAIN Ponorogo. [Google Scholar](#)
- Mayrudin, Yeby Ma'asan, Husna, Nabilla Amalia, & Yuliati, Fanny Rosye. (2020). Kontestasi Kuasa Kepemimpinan Formal dengan Informal dalam Kebijakan Publik dan Politik Keseharian. *Journal of Political Issues*, 2(1), 1–9. [Google Scholar](#)
- Nugroho, Hanantyo Sri. (2018). Democratic governance (Studi mengenai governability dalam pengembangan UMKM berbasis e-commerce di Kota Yogyakarta). *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 6(1), 30. [Google Scholar](#)
- Prawoto, Sigit. (2018). *Hegemoni wacana politik*. Universitas Brawijaya Press. [Google Scholar](#)
- Ramlah, Ramlah. (2021). *Praktik Akad Muzâra'ah dalam Mapeppe Dare pada Masyarakat Desa Nepo Kabupaten Barru*. IAIN Parepare. [Google Scholar](#)
- Rijal, Syamsu. (2019). *Book-Potensi Sejarah Dan Budaya Mandar Dalam Perspektif Pariwisata*. Politeknik Pariwisata Makassar. [Google Scholar](#)
- Royandi, Eva, Satria, Arif, & Saharuddin, Saharuddin. (2019). Kelompok Kepentingan Dan Relasi Kuasa Dalam Pengelolaan Sumber Daya Laut Palabuhanratu. *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*, 8(2), 163–173. [Google Scholar](#)
- Saad, Harianto. (2020). *Komunikasi Nilai Islam Terhadap Tradisi Mappenre Ota Pada Masyarakat Lanyer Kecamatan Bacukiki Kota Parepare*. IAIN Parepare. [Google Scholar](#)
- Saden, Yulius Esel, yang Ideal, Memimpikan Bangunan Pendidikan, Jagau, Yanedi, Dayak, Berdagang di Antara Jalinan Sukubangsa, & Raya, Banjar di Pasar Pahandut Palangka. (n.d.). *Daftar Isi*. [Google Scholar](#)
- Setyorini, Wahyu. (2020). Interaksi Sosial Masyarakat Dalam Menjaga Toleransi Antar Umat Beragama (Desa Gumeng Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar). *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, 8(3), 1078–1093. [Google Scholar](#)
- Sihotang, Juliana. (2019). *Kepemimpinan Dalam Kekebabatan Pada Masyarakat Desa Teluk Roban Kec. Sorkam Kab. Tapanuli Tengah*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. [Google Scholar](#)
- Soesanto, Heri. (2019). *Pemimpin: Menciptakan Budaya Unggul Generasi Milenial*. PT Kanisius. [Google Scholar](#)
- Sofyan, Hamdan Kautsar. (2021). *Peran Tokoh Agama Islam Dalam Pemilihan Kepala Desa Utama Tahun 2020 (Studi Kasus di Desa Utama Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis)*. Universitas Siliwangi. [Google Scholar](#)
- Syukur, Iskandar. (2016). *Perluasan dan Hubungan Kekuasaan di Desa Masyarakat Hukum Adat Saibatin, Lampung, Indonesia*. University of Malaya (Malaysia). [Google Scholar](#)
- Umam, Fauzi Nurkhotibul. (2020). *Politik Dinasti Kepala Desa (Studi Se-abad Keluarga Raden Saleh Berkuasa Mulai 1879-1988 Di Desa Tawangbanteng Kabupaten Tasikmalaya)*. Universitas Siliwangi. [Google Scholar](#)